



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 26 Oktober 2020

Halaman: 9

Pemkot Bakal Terima Dana Hibah Pariwisata Rp33 M

● DPRD Minta Penyaluran Bantuan Transparan

YOGYA, TRIBUN - Kota Yogyakarta dipastikan menjadi satu di antara daerah yang berhak menerima hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Bantuan tersebut, merupakan stimulus untuk menekan dampak pandemi Covid-19 khususnya di sektor pariwisata.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bakal menerima sekira Rp33 miliar dana hibah pariwisata tersebut. Bantuan tersebut, merupakan stimulus untuk menekan dampak pandemi Covid-19 khususnya di sektor pariwisata. Asisten Sekda Bidang Perekonomian Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, mengatakan, nantinya 70 persen dari dana hibah tersebut disalurkan pada pelaku wisata seperti hotel serta restoran. Sementara sisanya akan dikelola Pemkot untuk rangkaian kegiatan penanganan Covid-19 daerah.

"Jadi, yang 30 persennya itu untuk macam-macam, misalnya sosialisasi dan pajak restoran.

"Karena sifatnya hibah, prosesnya harus selektif. Tidak ada misalnya teman Wali Kota, atau teman Wakil Wali Kota, jadi semuanya harus klar. Penerima harus benar-benar penuh kriteria. Sehingga, tidak boleh ada intervensi di sana ya, termasuk oleh saya sekalipun," tegasnya.

Karena itu, orang nomor satu di Kota Yogyakarta tersebut meminta agar penyaluran dananya berbasis pada pengajuan dari para pelaku wisata. Dengan begitu, berupa suntikan yang dibutuhkan oleh hotel, atau restoran tertentu, bisa terdeteksi dan diberikan sesuai jumlah yang diajukannya.

Transparan

Kalangan legislatif berharap Pemkot Yogyakarta nantinya dapat menyalurkan dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI secara cermat. Sehingga, pemanfaatan benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi rakyat.

Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto menandaskan, selaras dengan tujuannya, dana hibah itu dicairkan oleh pemerintah pusat untuk menekan dampak pandemi Covid-19, terutama di sektor pariwisata yang kini lesu kondisinya.

"Jadi, harapan kami untuk proses penyaluran dana hibah ini, harus melibatkan semua pemangku kepemimpinan yang ada di Kota Yogyakarta, supaya tepat sasaran," ujarnya. (aka)

● ke halaman 15

Pemkot Bakal Terima Dana

● Sambungan Hal 9

protokol kesehatan, kemudian CHSE (cleanliness, health, safety, environment), lalu untuk monitoring dan sosialisasi pembuatan laporannya ya," ungkapnya, akhir pekan lalu.

Kadri tidak menampik, saat ini hampir semua pelaku wisata di Kota Yogyakarta terdampak pandemi Covid-19, lantaran geliat yang menurun drastis dibanding masa normal lalu. Akan tetapi, dengan dana hibah yang sangat terbatas, pihaknya tak bisa membagikannya secara merata.

"Kalau bicara dampak, semua hotel dan restoran itu terkena dampak. Sekarang semua kesulitan, karena ada berbagai pembatasan yang berdampak pada wisata," ujar Kadri.

"Tapi, ini ada kriterianya, masih kami siapkan. Antara lain, ada syarat hotel atau restoran statusnya masih beroperasi, punya izin, membayar pajak dan lain-lain. Berdasarkan persyaratan itu, kemudian nanti kita seleksi lagi," tambahnya. Mengenai pencairannya, Kadri menjelaskan bahwa sejauh ini masih dalam proses. Selain menyelesaikan draft rencana kegiatan, pihaknya pun masih menunggu penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah oleh Wali Kota Yogyakarta, dengan pejabat Kementerian Pariwisata dan Ekraf.

"Nominal yang akan diterima hotel dan restoran juga masih kita kaji, untuk fix datanya masih dihalangi, karena itu juga melibatkan beberapa instansi, termasuk Dinas Perizinan. Nanti pencairannya dalam dua tahap, pertama 50 persen dulu. Tapi, harapannya, bisa selesai 2020," pungkas Kadri.

Masih memproses

Wali Kota Yogyakarta, Har-Yadi Suyuti mengatakan, saat ini pihaknya masih memproses pencarian dana hibah tersebut ke pemerintah pusat. Mengingat besarnya, ia pun enggan berandai-andai, namun diharapkan sanggup mendukung program kegiatan pemulihan ekonomi kota pelajar.

"Ya, ini harus benar-benar ditujukan dalam rangka kegiatan pemulihan ekonomi. Apalagi, pemulihan ekonomi itu tidak hanya di ujung, tetapi dalam pencegahan dan penanganan juga ada, karena itu sangat kompleks," terangnya.

Sekadar informasi, dalam program tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI menyediakan dana Rp3,3 triliun untuk disalurkan kepada 101 kabupaten, atau kota di Indonesia. Daerah-daerah itu terpilih lantaran memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Kriterianya antara lain, masuk dalam 10 destinasi prioritas pariwisata dan lima destinasi super prioritas. Lalu, berstatus ibukota provinsi sebagai destinasi branding. Kemudian, PAD dari daerah dalam program hibah ini, minimal 15 persen berasal dari pajak hotel

Instansi

1. Din. Pariwisata
2.
3.
4.
5.

✓ Netral
✓ Biasa
✓ Untuk diketahui

Ig. Trihastono, S.Sos, MM

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005